



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

FEBRUARI - AGUSTUS 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena atas Izinnya sehingga penyusunan "Laporan Pelayanan Informasi Publik (PPID) dari Bulan Februari s/d Agustus 2021" laporan ini adalah merupakan tugas yang harus diselesaikan oleh tim PPID Bawaslu Kabupaten Berau di lingkungan Bawaslu RI sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap tugas yang telah dilaksanakan.

Maka pada kesempatan ini izinkan kami atas nama seluruh tim PPID Bawaslu Kabupaten Berau mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak-pihak yang telah berperan aktif terkait membantu dalam hal Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik (PPID) dari Bulan Februari s/d Agustus 2021, sehingganya laporan ini dapat selesai sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Sebagaimana yang telah di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Peraturan Badan Pengawas pemilu No.10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Tentu kami sangat menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik (PPID) dari Bulan Februari s/d Agustus 2021 masih banyak terdapat kekurangannya, oleh karena itu masukkan, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi suksesnya tugas dan tanggung jawab tim PPID Bawaslu Kabupaten Berau sebagai pengawas pelaksanaan demokrasi Pemilihan Kepala Daerah di

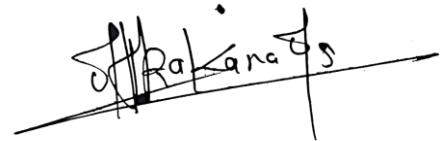
Kabupaten Berau dengan semboyan “Bersama Rakyat Awasi Pemilu,
Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”.

Akhir kata semoga Allah SWT selalu memberikan lindungan, petunjuk
dan bimbingan serta kesehatan kepada kita semua Amin.

Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Berau, 20 September 2021

Kordiv. PPID

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ira Kencana', written over a horizontal line.

Ira Kencana, S.E

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Ruang Lingkup	3
1.4 Maksud dan Tujuan	3
BAB II.....	5
Gambaran Umum	5
2.1 Struktur Organisasi	5
2.2 Penetapan Informasi Yang Dikecualikan	5
BAB III.....	12
Program.....	12
3.1 Pengelolaan Data dan Informasi	12
3.2 Media Publikasi	12
3.3 Pelayanan Informasi Publik	13
BAB IV.....	14
Pelaksanaan Program.....	14
4.1 Media Publikasi	14
4.2 Pelayanan Informasi Publik	15
4.3 Pelayanan Informasi Publik	17
4.4 Jumlah Permohonan Informasi Publik	22
BAB V.....	23

Kendala dan Tindak Lanjut	23
5.1 Permasalahan	23
5.2 Penyelesaian Masalah.....	23
BAB VI.....	25
PENUTUP	25
6.1 Kesimpulan	25
6.2 Saran dan Rekomendasi.....	25

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Daftar Informasi Publik Tahun 2021	17
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi PPID Bawaslu Kab.Berau.....	5
Gambar 4. 1 Permohonan Informasi Bulan Februari s/d Agustus 2021	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga agar berdaya guna, berhasil, bersih dan bertanggung jawab serta sebagai upaya untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik perlu membentuk suatu siklus akuntabilitas kinerja lembaga yang dilaksanakan secara terus menerus. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, landasan hukum yang berkaitan dengan pertama, hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; Kedua, kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional, dan cara sederhana; Ketiga, pengecualian bersifat ketat dan terbatas; keempat, kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate sehingga tercipta lembaga yang bersih dan mampu menyediakan Public Goods and Services sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat responsif, demokratis, cepat, tepat dan berlandaskan keterbukaan informasi sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada Lembaga Penyelenggaran Pemilu/Pilkada menjadi tinggi.

PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dimana PPID ini berfungsi sebagai penjabat yang bertanggung jawab sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID di lembaga Bawaslu Kabupaten Berau maka diharapkan masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada lembaga Bawaslu.

1.2 Dasar Hukum

- a. Dalam penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik (PPID) dari Bulan Februari s/d Agustus 2021, tentunya memiliki landasan hukum PPID sebagai Berikut ;
- b. Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28 F : "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."
- c. Undang – Undang Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 14 (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan sejenis sarana yang tersedia.
- d. Undang – Undang Nomor. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak – Hak Sipil dan Politik Pasal 19 ayat (2) Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.
- e. Perbawaslu No. 1 tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri

- f. Perbawaslu No. 17 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Luar Negeri
- g. Perbawaslu No. 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
- h. Perbawaslu No. 21 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

1.3 Ruang Lingkup

Pelaksanaan layanan informasi publik yang berada di lingkup Bawaslu Kabupaten Berau.

1.4 Maksud dan Tujuan

Adapun Maksud dan tujuan dalam penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut :

- a. Pedoman pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Berau dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap Satuan Kerja atau Divisi di lembaga Bawaslu Kabupaten Berau dalam penyediaan, pengumpulan, pendokumentasian dan pelayanan, serta penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lembaga Bawaslu Kabupaten Berau;
- b. Masing-masing Satuan Kerja atau Divisi di lembaga Bawaslu Berau mampu menyediakan, mengumpulkan, mendokumentasikan dan menyampaikan informasi tentang kegiatan dan produk unit kerjanya secara akurat dan tidak menyesatkan;
- c. Satuan Kerja atau Divisi di lembaga Bawaslu Kabupaten Berau mampu menyediakan, mengumpulkan, mendokumentasikan dan menyampaikan bahan dan produk informasi secara cepat dan tepat waktu; dan

- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Berau mampu memberikan pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu dengan biaya ringan dan cara sederhana.

BAB II

Gambaran Umum

2.1 Struktur Organisasi

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Berau merupakan ujung tombak pelayanan informasi yang mengelola dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Bawaslu Kabupaten Berau membentuk struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pembentukan PPID tersebut merujuk pada ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota dan Panwas Luar Negeri. sebagai struktur PPID Bawaslu Kabupaten Berau mulai dari Pembina dan Pengarah, Atasan PPID, Tim Pertimbangan, PPID, Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi (DATIN) di Bawaslu Berau.



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi PPID Bawaslu Kab.Berau

2.2 Penetapan Infomasi Yang Dikecualikan

Salah satu prinsip dalam keterbukaan informasi publik adalah seluruh informasi publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Klasifikasi informasi diperlukan guna memberikan kepastian hukum tentang informasi apa saja yang menjadi hak publik (yang dapat dibuka

dan/atau diberikan berdasarkan permintaan) dan mana yang tidak/belum dapat diakses publik, melindungi data pribadi warga, memastikan asas manfaat dari informasi publik, memastikan cara apa yang dapat ditempuh warga untuk mendapatkan informasi, dan memastikan konsekuensi hukum jika Badan Publik mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman informasi tersebut.

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI BAWASLU

1. Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

No.	Informasi
1	Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan
2	Formulir Model A.2 Formulir Temuan
3	Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4	Formulir Model A.4 Undangan Klarifikasi
5	Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji
6	Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji
7	Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi
8	Formulir Model A.8 Kajian Dugaan Pelanggaran
9	Formulir Model A.9 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
10	Formulir Model A.10 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
11	Formulir Model A.11 Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
12	Formulir Model A.12 Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
13	Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
14	Formulir Model TSM GBW-2 – Tanda Bukti Penerimaan Berkas
15	Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif
16	Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan

	Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
17	Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan
18	Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan
19	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
20	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
21	Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS
22	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
23	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

2. Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan

24	Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
25	Formulir Model B2. Temuan
26	Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
27	Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
28	Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
29	Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi
30	Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah
31	Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
32	Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
33	Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran
34	Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
35	Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
36	Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
37	Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-undangan Pemilu
38	Formulir Model B15. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi

	Bawaslu/Bawasli Provinsi
39	Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu

3. Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan

40	Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
41	Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
42	Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
43	Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)
44	Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
45	Daftar saksi dan/atau ahli
46	Daftar tersangka
47	Daftar barang bukti
48	Laporan polisi
49	Tanda bukti laporan
50	Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
51	Pengembalian berkas penuntut ke penyidik
52	Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

4. Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

53	Alat kerja pengawasan
----	-----------------------

5. Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan

54	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
55	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/PanwasKecamatan
56	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
57	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

6. Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan

58	Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
59	Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran

7. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang
Dikecualikan

60	Jawaban Atas Gugatan
61	Duplik Atas Replik
62	Kesimpulan
63	Memori Banding
64	Kontra Memori Banding
65	Memori Kasasi
66	Kontra Memori Kasasi
67	Keterangan Tertulis

8. Penetapan 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020

Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang
Dikecualikan

68	Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait
69	Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah
70	Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan
71	Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan
72	Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan
73	Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
74	Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
75	SK penetapan panitia musyawarah
76	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno pimpinan Bawaslu mengenai proses penyelesaian

	sengketa
77	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup
78	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup

9. Penetapan 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020

Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

79	Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan
----	---

10. Penetapan 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020

Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan

80	Formulir Model A.1 Laporan
81	Formulir Model A.2 Temuan
82	Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
83	Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan
84	Formulir Model A.4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
85	Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
86	Formulir Model A.5. Pelimpahan
87	Formulir Model A.6. Informasi Awal
88	Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal
89	Formulir Model A.7. Undangan Klarifikasi
90	Formulir Model A.8. Keterangan Klarifikasi
91	Formulir Model A.9 Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
92	Formulir Model A.10. Berita Acara Klarifikasi
93	Formulir Model A.11. Kajian Dugaan Pelanggaran
94	Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik

	Penyelenggara Pemilihan
95	Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
96	Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilu
97	Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya
98	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan

11. Penetapan 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020
Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-Kwk Yang
dikecualikan

99	Dokumentasi Formulir 1 Model C. Hasil KWK
----	---

BAB III

Program

3.1 Pengelolaan Data dan Informasi

Bawaslu Kabupaten Berau menyadari sangat pentingnya data pengawasan Pemilu/Pemilihan untuk meningkatkan kualitas dari sebuah penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Saat ini metode pengumpulan, pengelolaan dan penyiapan informasi Bawaslu Kabupaten Berau menggunakan Google Drive yang sudah terlaksanakan dengan baik dan data-data yang dikumpulkan yaitu data-data sesuai informasi publik di menu website PPID. Antisipasi media penyimpanan selain google drive yaitu data-data tersebut di backup ke komputer/laptop sebagai media penyimpanan. Pengumpulan data dan informasi saat ini hanya untuk mengisi konten website PPID di bagian Menu Informasi Publiknya. Berikut ini alur pengumpulan data dan informasi oleh Bawaslu Kabupaten Berau Tahun 2020.

3.2 Media Publikasi

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pada Pasal 7 ayat (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Dalam rangka menjakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 7 ayat (2) Bawaslu telah memiliki Layanan informasi secara online, yang bisa diakses publik, adalah Demi memenuhi kebutuhan informasi publik, Bawaslu telah memiliki website PPID Bawaslu. Adapun alamat website PPID Bawaslu adalah <http://www.ppid.berau.bawaslu.go.id/>. Website tersebut dapat diakses masyarakat dalam upaya mencari informasi. Pada website tersebut berisi beberapa informasi bawaslu. Masyarakat sebagai pemohon informasi tentu bisa mencari informasi yang terdapat di laman Informasi Publik. Laman informasi public pada website bawaslu terbagi atas empat kategori. Adapun empat kategori adalah informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi

yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.

3.3 Pelayanan Informasi Publik

1. Nilai-Nilai Kepribadian Bagi Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik
2. Kewajiban Bagi Pelaksana Pelayanan Informasi Publik
3. Larangan Bagi Pelaksana Pelayanan Informasi Publik
4. Dalam ketentuan UU No.14/2008 tentang KIP ada empat kategori Informasi

BAB IV

Pelaksanaan Program

4.1 Media Publikasi

Informasi adalah berbagai macam berita, materi yang berisikan riwayat berbagai kegiatan, fungsi, cara kerja lengkap yang harus diketahui oleh orang lain/masyarakat.

Salah satu kegiatan PPID Bawaslu Kabupaten Berau adalah Publikasi. Publikasi itu sendiri adalah kegiatan untuk menceritakan kepada masyarakat luas tentang hasil dalam bentuk kegiatan lembaga. Dengan publikasi dapat menghasilkan suatu citra dan itu berhubungan dengan informasi yang memadai yang diperoleh publik/masyarakat.

1. Menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi.
2. Menyiapkan bahan Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pengelolaan dan Dokumentasi Informasi.
3. Menyiapkan bahan rumusan norma standar prosedur pengelolaan informasi, opini dan aspirasi publik di lingkup bawaslu kabupaten;
4. Menyiapkan bahan rumusan norma standar prosedur penyediaan akses informasi, pelayanan informasi publik;
5. Menyiapkan bahan perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan informasi, opini dan aspirasi publik di lingkup bawaslu
6. Menyediakan konten informasi dan dokumentasi;
7. Melaksanakan monitoring evaluasi pelaporan dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan Pengelolaan dan Dokumentasi Informasi.
8. Mengumpulkan data.
9. Melaksanakan pemantauan terhadap update informasi Website bawaslu.
10. Pembuatan media informasi kegiatan Bawaslu Kabupaten Berau.
11. Menyiapkan bahan dokumentasi untuk Publikasi Informasi.
12. Mendokumentasikan kegiatan bawaslu dan mempublikasi putusan serta rekomendasi.

13. Melaksanakan pemeliharaan terhadap media dokumentasi (Kamera, Camcorder, Peralatan studio, dsb) dan media informasi (Baliho, Running Text Board, dsb).
14. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan;
15. Menyusun laporan.

Selain karena penggunaannya yang masif, efektivitas penggunaan media sosial dalam sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu/Pemilihan juga didorong oleh karakteristik pengguna media sosial yang berbeda bagi setiap platform. Media sosial adalah medium untuk setiap Panduan Pengelolaan Sosial Media diinginkan sebagai penyampai pesan.

4.2 Pelayanan Informasi Publik

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala adalah informasi yang telah dikuasai dan didokumentasikan oleh Badan Publik untuk diumumkan secara teratur dan rutin tanpa ada permintaan;
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, adalah informasi yang apabila tidak disampaikan dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang berhubungan dengan tupoksi Badan Publik tanpa ada permintaan;
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat, adalah informasi yang telah dikuasai dan didokumentasikan oleh Badan Publik serta telah dinyatakan terbuka sebagai informasi yang dapat diakses oleh pengguna informasi bilamana ada permintaan;
4. Informasi yang dikecualikan, adalah informasi yang dikuasai dan didokumentasikan oleh Badan Publik yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi berdasarkan alasan-alasan pengecualian.

Waktu Pelayanan

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU

SELAMAT DATANG DI WEBSITE
**PPID BAWASLU
KABUPATEN BERAU**

WAKTU LAYANAN **08.00 - 16.00 WITA**
SENIN - JUM'AT

ALAMAT
Jln. Merah Delima No. 31 RT. 17 Tanjung Redeb
77315 - Kabupaten Berau

**BERSAMA SAKTI,
BAWASLU PEMILU, BERSAMA
BAWASLU TEGAKKAN
KEADILAN PEMILU**

Tata Cara Permohonan Informasi

BAWASLU
KABUPATEN BERAU

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI

- 1. Menyampaikan Permohonan**
Pemohon menyampaikan permohonan informasi kepada PPID melalui Website PPID, Surat Faksimil, Email, Telepon atau datang langsung ke tempat layanan PPID Bawaslu Kabupaten Berau.
- 2. Mengisi Formulir Permohonan**
Pemohon mengisi formulir / menyampaikan permohonan informasi dan memberikan salinan identitas diri / badan.
- 3. Menerima Bukti Permohonan**
Pemohon menerima bukti permohonan informasi dari petugas informasi apabila syarat permohonan telah dilengkapi.
- 4. Menerima Pemberitahuan Tertulis**
Dalam jangka 10 Hari Kerja, pemohon menerima pemberitahuan tertulis dari PPID.
- 5. Hasil Permohonan Informasi**
Pemohon informasi menerima informasi yang diminta atau Surat Keputusan PPID tentang penolakan permohonan informasi dari petugas.

**BERSAMA SAKTI,
BAWASLU PEMILU, BERSAMA
BAWASLU TEGAKKAN
KEADILAN PEMILU**

SALAM AWIS!

www.bawaslu.go.id @BawasluBerau

4.3 Pelayanan Informasi Publik

Implementasi Pelayanan Informasi Publik yang telah dilakukan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Berau pada dasarnya telah berjalan baik itu pemohon datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Berau maupun mengakses situs website PPID Bawaslu kabupaten Berau di www.ppid.berau.bawaslu.go.id

Tabel 4. 1 Daftar Informasi Publik Tahun 2021

A. INFORMASI BERKALA						
No	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk Informasi yang tersedia	Jangka waktu Penyimpanan
I. Informasi yang Berkaitan dengan Profil Bawaslu						
1	Alamat Lengkap Kantor Bawaslu Kabupaten Berau	Kordiv SDM, Organisasi, Data & Informasi	Informasi Berkala	2020	Soft Copy dan Hard Copy	Sesuai dengan Retensi Arsip
2	Visi dan Misi	Kordiv SDM, Organisasi, Data & Informasi	Informasi Berkala	2020	Soft Copy dan Hard Copy	Sesuai dengan Retensi Arsip
3	Tugas dan Fungsi Bawaslu	Kordiv SDM, Organisasi, Data & Informasi	Informasi Berkala	2020	Soft Copy dan Hard Copy	Sesuai dengan Retensi Arsip
4	Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Berau	Koordinator Sekretariat	Informasi Berkala	2020	Soft Copy dan Hard Copy	Sesuai dengan Retensi Arsip
5	Profil Singkat Ketua Bawaslu Kabupaten Berau / Kordiv Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Sengketa	Kordiv Pengawasan, Humas, dan Hubal	Informasi Berkala	2020	Soft Copy dan Hard Copy	Sesuai dengan Retensi Arsip
6	Profil Singkat Anggota Bawaslu Kabupaten Berau / Kordiv Pengawasan, Humas, dan Hubal	Kordiv Pengawasan, Humas, dan Hubal	Informasi Berkala	2020	Soft Copy dan Hard Copy	Sesuai dengan Retensi Arsip
7	Profil Singkat Anggota Bawaslu Kaltim / Kordiv SDM, Organisasi, Data & Informasi	Kordiv Pengawasan, Humas, dan Hubal	Informasi Berkala	2020	Soft Copy dan Hard Copy	Sesuai dengan Retensi Arsip
8	Profil Singkat Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Berau	Kordiv Pengawasan, Humas, dan Hubal	Informasi Berkala	2020	Soft Copy dan Hard Copy	Sesuai dengan Retensi Arsip
9	LHKPN Ketua, Anggota dan Korsek Bawaslu Kabupaten Berau tahun 2018	Kordiv SDM, Organisasi, Data & Informasi	Informasi Berkala	2019	Soft Copy dan Hard Copy	Sesuai dengan Retensi Arsip
9	LHKPN Ketua, Anggota dan Korsek Bawaslu Kabupaten Berau tahun 2019	Kordiv SDM, Organisasi, Data & Informasi	Informasi Berkala	2020	Soft Copy dan Hard Copy	Sesuai dengan Retensi Arsip
10	LHKPN Ketua, Anggota dan Korsek Bawaslu Kabupaten Berau tahun 2020	Kordiv SDM, Organisasi, Data & Informasi	Informasi Berkala	2021	Soft Copy dan Hard Copy	Sesuai dengan Retensi Arsip

II. Informasi Program dan Kinerja Bawaslu						
1	E-Book Kinerja Pengawas Pemilu di Kabupaten Berau	Kordiv Pengawasan, Humas, dan Hubal		2019	Soft Copy dan Hard Copy	Sesuai dengan Retensi Arsip
2	Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020 (Perbawaslu 6 tahun 2020)	Koordinator Sekretariat	Informasi Berkala	2020	Soft Copy dan Hard Copy	Sesuai dengan Retensi Arsip
3	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021	Koordinator Sekretariat	Informasi Berkala	2020	Soft Copy dan Hard Copy	Sesuai dengan Retensi Arsip
III. Informasi Mengenai Keuangan						
1	Laporan Realisasi Anggaran Satker Periode akhir Juni 2020 dan 2019	Koordinator Sekretariat	Informasi Berkala	2020	Soft Copy dan Hard Copy	Sesuai dengan Retensi Arsip
2	Ringkasan Anggaran Bawaslu Kabupaten Berau tahun 2020	Koordinator Sekretariat	Informasi Berkala	2020	Soft Copy dan Hard Copy	Sesuai dengan Retensi Arsip
3	Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja periode Akhir Desember 2020 dan 2019	Koordinator Sekretariat	Informasi Berkala	2020	Soft Copy dan Hard Copy	Sesuai dengan Retensi Arsip
IV. Informasi Mengenai Organisasi, Administrasi, dan Kepegawaian						
1	Informasi Kepegawaian Bawaslu Kabupaten Berau Tahun 2019 dan Tahun 2020	Koordinator Sekretariat	Informasi Berkala	2021	Soft Copy dan Hard Copy	Sesuai dengan Retensi Arsip
2	Pedoman Pengelolaan Keuangan di lingkungan Bawaslu (Keputusan no 433 tahun 2017)	Koordinator Sekretariat	Informasi Berkala	2020	Soft Copy dan Hard Copy	Sesuai dengan Retensi Arsip
3	Buletin Bawaslu Kabupaten Berau Periode April – Juni 2020	Kordiv Pengawasan, Humas, dan Hubal	Informasi Berkala	2020	Soft Copy dan Hard Copy	Sesuai dengan Retensi Arsip
4	Catatan Atas Laporan BMN Semester 1 TA 2019	Koordinator Sekretariat	Informasi Berkala	2020	Soft Copy dan Hard Copy	Sesuai dengan Retensi Arsip
5	Catatan Atas Laporan BMN Semester 2 TA 2019	Koordinator Sekretariat	Informasi Berkala	2020	Soft Copy dan Hard Copy	Sesuai dengan Retensi Arsip
6	Pedoman Kepegawaian / Tata Tertib Pegawai di Bawaslu (Perbawaslu 10 tahun 2014)	Koordinator Sekretariat	Informasi Berkala	2021	Soft Copy dan Hard Copy	Sesuai dengan Retensi Arsip

7	Pedoman Pengelolaan Organisasi di Bawaslu (Perbawaslu 2 tahun 2013)	Kordiv SDM, Organisasi, Data & Informasi	Informasi Berkala	2021	Soft Copy dan Hard Copy	Sesuai dengan Retensi Arsip
8	Prosedur dan Tata Cara Pelaporan Dugaan Pelanggaran pada Pilkada Serentak tahun 2020	Kordiv Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Sengketa	Informasi Berkala	2020	Soft Copy dan Hard Copy	Sesuai dengan Retensi Arsip
9	Prosedur dan Tata Cara Pengajuan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan dan Sengketa Antarpeserta Pemilihan	Kordiv Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Sengketa	Informasi Berkala	2020	Soft Copy dan Hard Copy	Sesuai dengan Retensi Arsip
10	SK PPID tahun 2021	Koordinator Sekretariat	Informasi Berkala	2021	Soft Copy dan Hard Copy	Sesuai dengan Retensi Arsip
11	SK PAW Panwascam Segah dan Biduk-Biduk 2020	Kordiv SDM, Organisasi, Data & Informasi		2021	Soft Copy dan Hard Copy	Sesuai dengan Retensi Arsip
V. Informasi Mengenai Pelayanan Informasi Publik						
1	Laporan PPID Bawaslu Kabupaten Berau tahun 2019 (periode Januari 2018 – Agustus 2019)	Kordiv SDM, Organisasi, Data & Informasi	Informasi Berkala	2019	Soft Copy dan Hard Copy	Sesuai dengan Retensi Arsip
2	Daftar Informasi Publik 2020 dan 2021	Kordiv SDM, Organisasi, Data & Informasi	Informasi Berkala	2021	Soft Copy dan Hard Copy	Sesuai dengan Retensi Arsip
VI. Informasi Hasil Penelitian						
1	Indeks kerawanan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020	Kordiv Pengawasan, Humas, dan Hubal	Informasi Berkala	2021	Soft Copy dan Hard Copy	Sesuai dengan Retensi Arsip
2	Rekapitulasi Penindakan Pelanggaran pada Pemilu tahun 2019	Kordiv Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Sengketa	Informasi Berkala	2020	Soft Copy dan Hard Copy	Sesuai dengan Retensi Arsip
3	Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilihan Umum tahun 2019	Kordiv Pengawasan, Humas, dan Hubal	Informasi Berkala	2020	Soft Copy dan Hard Copy	Sesuai dengan Retensi Arsip
4	Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Umum tahun 2019	Kordiv Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Sengketa	Informasi Berkala	2020	Soft Copy dan Hard Copy	Sesuai dengan Retensi Arsip
5	Laporan Akhir Penyelesaian Sengketa Proses pada Pemilihan Umum tahun 2019	Kordiv Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Sengketa	Informasi Berkala	2020	Soft Copy dan Hard Copy	Sesuai dengan Retensi Arsip
6	Laporan Komprehensif hasil Pengawasan Pemilihan Umum tahun 2019	Kordiv SDM, Organisasi, Data & Informasi	Informasi Berkala	2020	Soft Copy dan Hard Copy	Sesuai dengan Retensi Arsip
7	Pengawasan Daftar Penetapan Pasangan Calon pada Pilkada Serentak tahun 2020	Kordiv Pengawasan, Humas, dan Hubal	Informasi Berkala	2020	Soft Copy dan Hard Copy	Sesuai dengan Retensi Arsip
8	Pengawasan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pilkada Serentak tahun 2020	Kordiv Pengawasan, Humas, dan Hubal	Informasi Berkala	2020	Soft Copy dan Hard Copy	Sesuai dengan Retensi Arsip

9	Laporan Komprehensif Bawaslu Kabupaten Berau Tahun 2020	Kordiv SDM, Organisasi, Data & Informasi	Informasi Berkala	2021	Soft Copy dan Hard Copy	Sesuai dengan Retensi Arsip
10	Laporan Akhir Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Berau Tahun 2020	Kordiv Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Sengketa	Informasi Berkala	2021	Soft Copy dan Hard Copy	Sesuai dengan Retensi Arsip
11	Laporan Akhir Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Berau Tahun 2020	Kordiv SDM, Organisasi, Data & Informasi	Informasi Berkala	2021	Soft Copy dan Hard Copy	Sesuai dengan Retensi Arsip
12	Laporan Akhir Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Berau Tahun 2020	Kordiv Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Sengketa	Informasi Berkala	2021	Soft Copy dan Hard Copy	Sesuai dengan Retensi Arsip
13	Potret Pilkada 2020 sebagai Laporan Akhir Pengawasan Pilkada tahun 2020	Kordiv Pengawasan, Humas, dan Hubal	Informasi Berkala	2021	Soft Copy dan Hard Copy	Sesuai dengan Retensi Arsip
14	Laporan Akhir Pembentukan Panwas Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Kab.Berau tahun 2020	Kordiv SDM, Organisasi, Data & Informasi	Informasi Berkala	2021	Soft Copy dan Hard Copy	Sesuai dengan Retensi Arsip
15	Laporan Akhir Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Se Kabupaten Berau tahun 2020	Kordiv SDM, Organisasi, Data & Informasi	Informasi Berkala	2021	Soft Copy dan Hard Copy	Sesuai dengan Retensi Arsip
16	Rekapitulasi Penyelesaian Sengketa Format Bawaslu RI	Kordiv Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Sengketa	Informasi Berkala	2021	Soft Copy dan Hard Copy	Sesuai dengan Retensi Arsip

B. INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT

VII. Informasi Mengenai Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan

1	Penetapan PPID Bawaslu tentang Informasi Dokumentasi Formulir Model C.Hasil-KWK yang Dikecualikan	Kordiv SDM, Organisasi, Data & Informasi	Informasi Setiap Saat	2021	Soft Copy dan Hard Copy	Sesuai dengan Retensi Arsip
2	Penetapan PPID Bawaslu tentang Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan yang Dikecualikan	Kordiv SDM, Organisasi, Data & Informasi	Informasi Setiap Saat	2021	Soft Copy dan Hard Copy	Sesuai dengan Retensi Arsip
3	Penetapan PPID Bawaslu tentang Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan yang Dikecualikan	Kordiv SDM, Organisasi, Data & Informasi	Informasi Setiap Saat	2021	Soft Copy dan Hard Copy	Sesuai dengan Retensi Arsip
4	Penetapan PPID Bawaslu tentang Informasi Pengawasan Pemilu / Pemilihan yang Dikecualikan	Kordiv SDM, Organisasi, Data & Informasi	Informasi Setiap Saat	2021	Soft Copy dan Hard Copy	Sesuai dengan Retensi Arsip
5	Penetapan PPID Bawaslu tentang Informasi Penanganan Perkara Hukum di Pengadilan yang Dikecualikan	Kordiv SDM, Organisasi, Data & Informasi	Informasi Setiap Saat	2021	Soft Copy dan Hard Copy	Sesuai dengan Retensi Arsip

6	Penetapan PPID Bawaslu tentang Informasi Seleksi Pengawas Pemilu / Pemilihan <i>AD HOC</i> yang Dikecualikan	Kordiv SDM, Organisasi, Data & Informasi	Informasi Setiap Saat	2021	Soft Copy dan Hard Copy	Sesuai dengan Retensi Arsip
7	Penetapan PPID Bawaslu tentang Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum yang Dikecualikan	Kordiv SDM, Organisasi, Data & Informasi	Informasi Setiap Saat	2021	Soft Copy dan Hard Copy	Sesuai dengan Retensi Arsip
8	Penetapan PPID Bawaslu tentang Informasi Alat Kerja Pengawasan sebagai Informasi yang Dikecualikan	Kordiv SDM, Organisasi, Data & Informasi	Informasi Setiap Saat	2021	Soft Copy dan Hard Copy	Sesuai dengan Retensi Arsip
9	Penetapan PPID Bawaslu tentang Informasi Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yang Dikecualikan	Kordiv SDM, Organisasi, Data & Informasi	Informasi Setiap Saat	2021	Soft Copy dan Hard Copy	Sesuai dengan Retensi Arsip
10	Penetapan PPID Bawaslu tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Kordiv SDM, Organisasi, Data & Informasi	Informasi Setiap Saat	2021	Soft Copy dan Hard Copy	Sesuai dengan Retensi Arsip
C. INFORMASI SERTA MERTA						
1	Rekomendasi Administrasi dan Tindak lanjut Rekomendasi Administrasi Bawaslu Kab Kota pada Pilkada Serentak tahun 2020 di Kabupaten Berau	Kordiv Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Sengketa	Informasi Serta Merta	2021	Soft Copy dan Hard Copy	Sesuai dengan Retensi Arsip
2	Rekomendasi Etik dan Tindak lanjut Rekomendasi Etik Bawaslu Kab Kota pada Pilkada Serentak tahun 2020 di Kabupaten Berau	Kordiv Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Sengketa	Informasi Serta Merta	2021	Soft Copy dan Hard Copy	Sesuai dengan Retensi Arsip
3	Rekomendasi Hukum Lainnya dan Tindak lanjut Rekomendasi Hukum Lainnya Bawaslu Kab Kota pada Pilkada Serentak tahun 2020 di Kabupaten Berau	Kordiv Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Sengketa	Informasi Serta Merta	2021	Soft Copy dan Hard Copy	Sesuai dengan Retensi Arsip
4	Putusan Pidana dan Putusan Banding pada Pilkada Serentak tahun 2020 di wilayah Kabupaten Berau	Kordiv Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Sengketa	Informasi Serta Merta	2021	Soft Copy dan Hard Copy	Sesuai dengan Retensi Arsip
5	Peringatan Tertulis Penerapan Protokol Kesehatan pada Pilkada Serentak tahun 2020 di wilayah Kabupaten Berau	Kordiv Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Sengketa	Informasi Serta Merta	2021	Soft Copy dan Hard Copy	Sesuai dengan Retensi Arsip

Sumber data Bawaslu Kabupaten Berau

4.4 Jumlah Permohonan Informasi Publik

Layanan informasi publik PPID Bawaslu dilakukan pada hari kerja dari Senin sampai Jumat mulai pukul 08.00 WITA hingga pukul 16.00 WITA dengan waktu istirahat pukul 12.00 WIB sampai 13.00 WIB. Adapun rincian Pelayanan informasi publik sepanjang Bulan Februari s/d Agustus 2021 dapat dirinci sebagai berikut :



Gambar 4. 1 Permohonan Informasi Bulan Februari s/d Agustus 2021

Selama bulan Februari sampai Agustus 2021, PPID Bawaslu Kabupaten Berau telah menerima permohonan informasi publik sebanyak 1 (satu) Permohonan. Permohonan informasi terbanyak terdapat pada bulan maret yang berjumlah 1 permohonan. Dibulan Februari Bawaslu Kabupaten Berau belum menerima permohonan informasi publik, begitu juga dengan bulan April, Mei, Juni, Juli, dan Agustus.

BAB V

Kendala dan Tindak Lanjut

5.1 Permasalahan

- a. Manajemen data dan informasi masih belum terstruktur dengan baik;
- b. Waktu yang diperlukan mengakses informasi sangat lama;
- c. Kurangnya koordinasi dan pemahaman dari setiap unit kerja;
- d. Kurangnya pemahaman terhadap keterbukaan informasi publik sesuai UU KIP;
- e. Spesialisasi dan kompetensi di bidang komunikasi masih terbatas, karena sebagian besar aparatur berlatar belakang manajemen dan administrasi;
- f. Pembangunan Infrastruktur sarana fisik dalam penyediaan informasi publik masih sedang dalam proses untuk terus melakukan inovasi dan letak tata ruang atau lay out ruang untuk PPID masih belum ditempatkan di posisi sentral/strategis;
- g. Mekanisme pelayanan informasi publik masih perlu ditingkatkan;
- h. Informasi masih sering di-klaim rahasia secara sepihak; dan
- i. Akses informasi publik belum mencerminkan keadilan.

5.2 Penyelesaian Masalah

- a. Meningkatkan koordinasi dengan semua pejabat PPID untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008. Melalui Rapat Kerja (Raker) pada semua PPID Bawaslu Kabupaten / Kota dengan membuat formulasi untuk peningkatan pelayanan informasi publik.
- b. Memberikan pemahaman kepada satuan kerja penghasil informasi terkait dengan UU No.14 Tahun 2008, khususnya terkait mengenai konsekuensi hukum.
- c. Terbangunnya hubungan kerjasama yang baik dengan institusi eksternal dan unit-unit internal di lingkungan Bawaslu Kabupaten Berau.

- d. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan Adanya peraturan yang mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik. Dengan cara membangun sarana dan prasarana system pelayanan infomasi yang dilakukan terus secara update atau berkesinambungan.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Setelah menyelesaikan laporan ini, dan selama melaksanakan tugas dan tanggung jawab divisi PPID dalam pelaksanaan bulan Februari s/d Agustus tahun 2021, maka dalam bab ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Data dan Informasi adalah bertugas dan bertanggung jawab dalam pengelolaan Data dan Informasi Publik yang ada dilembaga Bawaslu Kabupaten Berau;
2. PPID berfungsi dan berperan dalam melaksanakan Pelayanan Publik, mengelola dan mengkalafisikan Data Informasi Publik sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan serta mengikuti standar SOP yang telah berlaku dalam melakukan pelayanan publik kepada pemohon.

6.2 Saran dan Rekomendasi

Setelah pembuatan laporan ini selesai dengan baik, pada kesempatan ini pula kami selaku tim penyusun laporan ingin memberikan beberapan saran dan masukan. Dengan harapannya kedepan program-program PPID dapat saling sinkron terhadap semua divisi demi kemajuan dan nama baik lembaga Bawaslu Kabupaten / Kota serta Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.

1. PPID di Kabupaten Kota tidak ada kerangka anggarannya sama sekali. Mohon diusulkan kepada Kasek Prov untuk hal tersebut. Datin adalah Supporting seluruh kegiatan di Pengawasan Tahapan Pilkada Serentak tahun 2020, meminta untuk penganggaran pengelolaan Media Penyimpanan Digital ditahun selanjutnya, karena pada tahun 2020 masa berlakunya sudah habis. harus ada sebuah pertemuan khusus (mungkin di bawaslu RI) baik menggunakan zoom atau media lainnya;
2. Terkendala dalam proses pendanaan baik untuk maintenance perangkat komputer dan lainnya, penyimpanan data baik hardcopy maupun softcopy. Untuk kedepannya staf diberikan pelatihan rutin dalam proses pengelolaan PPID;

3. Selain masalah anggaran, juga dibutuhkan peningkatan / penguatan kapasitas terhadap pengelolaan dan pengarsipan Data dan Informasi, dibutuhkan inovasi terhadap pengelolaan data dan informasi selanjutnya, mungkin dalam bentuk infografis, videografis dan yang lainnya;
4. Sarana dan prasarana pada pengelolaan PPID yang sangat minim, memohon untuk dapat dianggarkan pada tahun selanjutnya. Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM, serta Pertemuan Korsek dan Kordiv tentang PPID. Tata Kelola kearsipan sampai saat ini masih menggunakan improvisasi, belum ada regulasi dan sarprasnya;
5. Semoga kedepan bisa tersedianya Anggaran khusus untuk Kegiatan PPID sehingga rancangan kegiatan atau program PPID bisa terfasilitasi dalam segi pelayanan informasi khususnya untuk masyarakat Kab.Berau bisa melihat Kegiatan yang akan berjalan di lingkungan Bawaslu Kab.Berau dan dikenal melalui PPID dengan memberikan dan menginformasikan Pelayanan kinerja Bawaslu Kab.Berau yang disediakan melalui program PPID.
6. Belum tersedianya Anggaran RAB untuk PPID sehingga Bawaslu Kab.Berau belum bisa membuat suatu laporan yang mencakup informasi Anggaran PPID.